

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Sektor pertanian mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2009). Menurut Irawan (2003) dalam Ibramsyah (2006), sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, karena merupakan sumber pendapatan, pembuka kesempatan kerja, pengentas kemiskinan, dan peningkatan ketahanan pangan nasional.

Lampung merupakan salah satu daerah yang mengembangkan pertanian sebagai sumber utama kegiatan ekonomi dan memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan daerah (38,63% pada tahun 2008). Hal ini terjadi karena Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam yang mendukung serta sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Dengan kata lain, sektor pertanian menduduki posisi teratas dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung, seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, tahun 2006-2008

No.	Lapangan Usaha	2006 (juta rupiah)	2007 (juta rupiah)	2008 (juta rupiah)
1.	Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	18.166.620,11	22.732.965,82	28.773.832,05
2.	Pertambangan dan	2.152.283,71	2.190.111,88	2.306.687,03

3.	penggalian Industri pengolahan	6.146.604,43	8.313.987,95	9.726.558,97
4.	Listrik dan air bersih	360.462,66	401.210,45	441.550,28
5.	Bangunan	2.650.103,32	3.079.057,18	3.278.268,15
6.	Perdagangan, restoran, dan hotel	7.573.094,71	8.714.733,36	10.158.964,22
7.	Angkutan dan komunikasi	3.813.853,99	5.094.877,47	6.660.142,21
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	2.968.016,43	3.665.181,66	4.772.936,99
9.	Jasa-jasa	5.287.949,55	6.729.840,47	8.371.658,87
<b>PDRB</b>		<b>49.118.988,91</b>	<b>60.921.966,47</b>	<b>74.490.598,79</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai PDRB sektor pertanian terus meningkat sejak tahun 2006 sampai tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian memiliki potensi yang besar di Provinsi Lampung dan memiliki peranan yang besar bagi perekonomian Provinsi Lampung.

Untuk dapat terus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertanian, maka perlu dilakukan peningkatan kegiatan pertanian di Provinsi Lampung. Salah satu sub-sektor pertanian yang dapat dikembangkan adalah sub-sektor perkebunan. Sub-sektor perkebunan di Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar, karena lahan perkebunan di Provinsi Lampung sangat luas dan hasil dari perkebunan tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Provinsi Lampung. Kontribusi dari sub-sektor perkebunan terhadap perekonomian Provinsi Lampung dapat diketahui melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung dari sektor pertanian, seperti tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku dari sektor pertanian, tahun 2006-2008

No.	Sub-sektor pertanian	2006 (juta rupiah)	2007 (juta rupiah)	2008 (juta rupiah)
1.	Tanaman bahan makanan	7.853.896	9.247.871	11.302.056
<b>2.</b>	<b>Tanaman perkebunan</b>	<b>3.337.242</b>	<b>4.648.344</b>	<b>6.575.287</b>
3.	Peternakan dan hasil-hasilnya	2.594.662	2.939.343	3.614.931
4.	Kehutanan	286.260	389.450	436.122
5.	Perikanan	4.094.541	5.507.958	6.845.436
<b>PDRB dari sektor pertanian</b>		<b>18.166.601</b>	<b>22.732.966</b>	<b>28.773.832</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sub-sektor perkebunan menempati urutan kedua tertinggi sebagai penyumbang PDRB Provinsi Lampung dari sektor pertanian, yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dengan persentase 18 persen pada tahun 2006, 20 persen pada tahun 2007, dan 23 persen pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa sub-sektor perkebunan di Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan.

Selain itu, pengembangan sub-sektor perkebunan perlu terus dilakukan, karena peranannya dalam peningkatan devisa negara melalui kegiatan ekspor-impor. Volume ekspor komoditi perkebunan, baik dalam bentuk segar maupun olahan di Provinsi Lampung pada tahun 2008 adalah sebesar 2.707.959,60 ton dengan nilai US \$ 2.551.238.890. Volume dan nilai ekspor komoditi perkebunan pada tahun 2008 tersebut meningkat dari tahun 2007 (di mana volume ekspor komoditi perkebunan pada tahun 2007 adalah 1.313.149,34 ton dengan nilai US \$ 680.690.997), dengan rata-rata pertumbuhan volume ekspor sebesar 26,23 persen dan rata-rata pertumbuhan nilai ekspor sebesar 65,51 persen (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2009).

Provinsi Lampung memiliki banyak komoditi perkebunan unggulan, di mana komoditi tersebut biasa dijadikan komoditi ekspor. Luas areal, produksi, dan produktivitas tanaman perkebunan unggulan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas areal, produksi, dan produktivitas tanaman perkebunan unggulan Provinsi Lampung, tahun 2008

No.	Komoditi	Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Bentuk hasil
1.	Kopi robusta	162.830	140.046	0,86	Biji kering asalan
2.	Lada	63.700	22.164	0,35	Lada hitam
3.	Cengkeh	7.627	452	0,66	Bunga kering
4.	Karet	96.738	56.009	0,58	Slab
5.	Kelapa dalam	127.802	111.112	0,87	Kopra
6.	Tebu	113.784	797.378	7,01	Gula hablur
7.	Kayu manis	1.743	517	0,30	Kulit kering
8.	Kapuk	3.490	665	0,19	Serat
9.	Kelapa hybrida	17.606	7.548	0,43	Kopra
<b>10.</b>	<b>Kakao</b>	<b>38.655</b>	<b>25.690</b>	<b>0,66</b>	<b>Biji kering</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa kakao menempati urutan keenam dalam hal luas lahan (setelah kopi robusta, kelapa dalam, tebu, karet, dan lada), tetapi urutan kelima dalam hal produksi. Walaupun saat ini kakao menempati urutan keenam, tetapi posisi tersebut masih dapat diperbaiki, karena kakao masih berpotensi untuk dikembangkan, sehingga kakao dapat menjadi komoditi unggulan yang pertama di Provinsi Lampung. Hal ini berkaitan dengan berbagai upaya perbaikan dan perluasan areal perkebunan kakao Indonesia yang pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 1,1 juta ha dan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 1,35 juta ha (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2005). Dengan demikian, secara

tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada perbaikan dan perluasan areal perkebunan kakao di Provinsi Lampung.

Komoditi kakao di Provinsi Lampung diusahakan oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta, sedangkan yang diusahakan oleh perkebunan besar negara tidak ada. Sebaran luas areal dan produksi perkebunan kakao rakyat dan swasta terhadap total luas areal dan produksi perkebunan kakao di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran luas areal dan produksi perkebunan kakao rakyat dan swasta di Provinsi Lampung, tahun 2004-2008

Ta- hun	Perkebunan kakao rakyat				Perkebunan kakao swasta				Total			
	Luas		Produksi		Luas		Produksi		Luas		Produksi	
	(ha)	(%)	(ton)	(%)	(ha)	(%)	(ton)	(%)	(ha)	(%)	(ton)	(%)
2004	29.566	90,87	18.200	87,16	2.972	9,13	2.681	12,84	32.538	100	20.881	100
2005	36.718	91,19	18.947	82,46	3.548	8,81	4.029	17,54	40.266	100	22.976	100
2006	36.597	91,39	21.548	84,14	3.448	8,61	4.063	15,86	40.045	100	25.611	100
2007	35.807	91,22	21.364	84,00	3.448	8,78	4.068	16,00	39.255	100	25.432	100
2008	35.457	91,73	21.662	84,32	3.198	8,27	4.028	15,68	38.655	100	25.690	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2004-2009

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2004-2008 proporsi luas areal dan produksi perkebunan kakao rakyat lebih besar dibandingkan dengan proporsi luas areal dan produksi perkebunan kakao swasta. Proporsi terbesar untuk luas areal perkebunan kakao rakyat terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 91,73 persen atau 35.457 ha dari total luas 38.655 ha. Proporsi terbesar untuk produksi perkebunan kakao rakyat terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 87,16 persen atau 18.200 ton dari total produksi 20.881 ton. Dari tahun 2004-2008 luas areal dan produksi perkebunan kakao rakyat serta perkebunan kakao swasta di Provinsi Lampung selalu berfluktuasi.

Dalam beberapa tahun terakhir pengusahaan komoditi kakao terus mengalami perubahan. Perkebunan kakao yang paling menunjukkan perubahan adalah perkebunan kakao yang dikelola oleh rakyat. Pada tahun 2008 terdapat perkebunan kakao rakyat seluas 35.457 ha (91,73%) dari 38.655 ha total luas perkebunan kakao di Provinsi Lampung (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, 2009).

Perkembangan luas areal dan produksi kakao perkebunan rakyat di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan luas areal tanam, produksi, dan produktivitas kakao perkebunan rakyat di Provinsi Lampung, tahun 2004-2008

Tahun	Luas areal		Produksi		Produktivitas	
	ha	r (%/th)	ton	r (%/th)	ton/ha	r (%/th)
2004	29.566	-	18.200	-	0,62	-
2005	36.718	24,19	18.947	4,10	0,52	-16,13
2006	36.597	-0,33	21.548	13,73	0,59	13,46
2007	35.807	-2,16	21.364	-0,85	0,60	1,69
2008	35.457	-0,98	21.662	1,39	0,61	1,67
Rata-rata	34.829	4,14	20.344	3,67	0,59	0,14

Keterangan: r = *rate of growth* (tingkat pertumbuhan)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa luas areal komoditi kakao rakyat terus mengalami penurunan mulai tahun 2006-2008, dan peningkatan hanya terjadi pada tahun 2005.

Akan tetapi, produksi dan produktivitas kakao pada tahun 2004-2008 cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2007 untuk produksi dan pada tahun 2005 untuk produktivitas. Pada tabel juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan luas areal, produksi dan produktivitas kakao pada tahun 2004-2008 adalah 4,14 persen, 3,67 persen dan 0,14 persen. Ini berarti bahwa sumber

utama pertumbuhan produksi kakao di Provinsi Lampung adalah perkembangan areal tanam.

Perkebunan kakao rakyat yang berada di Provinsi Lampung tersebar pada beberapa kabupaten. Salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kakao rakyat adalah Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur merupakan sentra kakao kedua setelah Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Walaupun demikian, Kabupaten Lampung Timur memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanggamus dan kabupaten lainnya, yaitu sebesar 0,88 ton/ha. Luas areal dan produksi kakao perkebunan rakyat per kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Luas areal dan produksi kakao perkebunan rakyat per kabupaten/kota di Provinsi Lampung, tahun 2008

No.	Kabupaten/Kota	Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Share <sup>*)</sup> (%)
1.	Lampung Barat	837	290	0,35	2,36
2.	Tanggamus	14.078	7.169	0,51	39,70
3.	Lampung Selatan	3.305	1.779	0,54	9,32
<b>4.</b>	<b>Lampung Timur</b>	<b>6.642</b>	<b>5.835</b>	<b>0,88</b>	<b>18,73</b>
5.	Lampung Tengah	2.837	1.750	0,62	8,00
6.	Lampung Utara	1.557	960	0,62	4,39
7.	Way Kanan	1.084	572	0,53	3,06
8.	Tulang Bawang	714	416	0,58	2,01
9.	Pesawaran	4.247	2.799	0,66	11,98
10.	Bandar Lampung	156	92	0,59	0,44
11.	Metro	-	-	-	-
	Provinsi Lampung	35.457	21.662	0,53	100,00

Keterangan: \*) = persentase terhadap luas areal di tingkat provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2009

Menurut Suara Pembaruan (2009), produktivitas potensial kakao adalah 1,5 ton/ha.

Dengan demikian, produktivitas kakao di Kabupaten Lampung Timur masih

memiliki kemungkinan untuk meningkat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Lampung Timur untuk menjadi daerah penghasil kakao utama di tingkat provinsi.

Luas areal perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Lampung Timur adalah 6.642 ha yang tersebar pada 24 kecamatan. Dari 24 kecamatan tersebut, terdapat beberapa kecamatan yang menjadi sentra kakao. Sepuluh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas areal dan produksi kakao perkebunan rakyat terbesar dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Luas areal, produksi dan produktivitas kakao perkebunan rakyat per kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, tahun 2005-2008

No.	Kecamatan	TBM (ha)	TM (ha)	TR (ha)	Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Sekampung Udik	612,50	1.553,50	6,00	2.172,00	1.398,15	0,90
<b>2.</b>	<b>Bandar Sribhawono</b>	<b>1.150,00</b>	<b>875,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1,00</b>
3.	Marga Tiga	360,00	794,00	21,00	1.175,00	725,72	0,91
4.	Labuhanratu	178,00	874,50	27,00	1.079,50	774,27	0,89
5.	Way Jepara	188,75	776,00	26,00	990,75	814,80	1,05
6.	Mataram Baru	213,00	643,00	8,00	864,00	516,00	0,80
7.	Jabung	244,00	535,00	26,00	805,00	452,50	0,85
8.	Sukadana	146,00	539,00	0	685,00	485,00	0,90
9.	Marga Sekampung	237,00	245,00	5,00	487,00	189,80	0,77
10.	Pekalongan	218,00	243,00	23,25	484,25	204,41	0,84

Keterangan:

TBM = Tanaman belum menghasilkan

TM = Tanaman menghasilkan

TR = Tanaman rusak

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2009

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa luas areal dan produksi kakao di Kecamatan Bandar Sribhawono berada pada urutan kedua setelah Kecamatan Sekampung Udik. Akan tetapi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar Sribhawono lebih tinggi



dibandingkan dengan produktivitas di Kecamatan Sekampung Udik. Produktivitas kakao di Kecamatan Bandar Sribhawono berada pada urutan kedua setelah produktivitas di Kecamatan Way Jepara, tetapi luas areal dan produksi kakao di Kecamatan Bandar Sribhawono lebih tinggi dibandingkan dengan luas areal dan produksi di Kecamatan Way Jepara.

Selain merupakan sentra kakao kedua di Kabupaten Lampung Timur, lahan kakao di Kecamatan Bandar Sribhawono juga terus meningkat. Hal ini dikarenakan banyak petani di Kecamatan Bandar Sribhawono yang beralih menanam kakao dari sebelumnya menanam jagung. Selain merupakan sentra kakao, Kecamatan Bandar Sribhawono juga merupakan sentra jagung, akan tetapi saat ini lahan milik petani banyak yang dialihkan untuk menanam kakao. Ini karena petani beranggapan bahwa menanam kakao lebih menguntungkan dibandingkan menanam jagung, sebab dalam berusaha jagung petani sering mengalami kerugian akibat rendahnya produksi jagung yang diakibatkan oleh penyakit bulai yang sering menyerang tanaman jagung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Sribhawono.

Tanaman kakao yang diusahakan oleh perkebunan rakyat terus mengalami peningkatan, sehingga lebih luas dibandingkan dengan yang diusahakan oleh perkebunan swasta. Hal ini terjadi karena petani tidak mungkin dibatasi/dilarang untuk tidak mengusahakan tanaman kakao. Ini disebabkan oleh anggapan petani bahwa usahatani kakao masih menguntungkan dan menjanjikan, sebab kakao

merupakan komoditi ekspor yang memiliki permintaan dan nilai jual yang tinggi, terutama di pasar internasional.

Meskipun perkebunan kakao rakyat terus meningkat, tetapi perkebunan kakao rakyat masih memiliki kelemahan, yaitu teknik budidaya yang dilakukan petani masih sederhana, modal para petani terbatas, alat-alat yang digunakan masih sederhana, dan tingkat pendidikan para petani yang masih rendah yang menyebabkan petani kurang dapat mengadopsi teknologi dan inovasi yang ada. Kelemahan tersebut menyebabkan pelaksanaan budidaya dan penanganan pasca panen kakao perkebunan rakyat tidak sesuai dengan anjuran yang seharusnya, sehingga menyebabkan mutu kakao yang dihasilkan menjadi rendah. Rendahnya mutu kakao perkebunan rakyat, dikarenakan kakao yang dihasilkan tidak difermentasi dan banyak mengandung kotoran. Hal inilah yang terjadi di daerah penelitian.

Oleh karena mutu kakao yang dihasilkan rendah, maka seringkali harga kakao Indonesia mendapatkan potongan harga sekitar 15 persen dari rata-rata harga kakao dunia (Suara penyuluh, 2009). Pemotongan harga tersebut berakibat pada rendahnya harga yang diterima petani, sehingga mengurangi penerimaan petani. Selain itu, pemotongan harga tersebut juga berpengaruh pada keuntungan ekonomi yang diterima negara. Rendahnya mutu kakao yang dihasilkan juga akan mempengaruhi daya saing dari kakao tersebut di pasar internasional.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perlu diketahui apakah usahatani kakao yang dikelola oleh petani rakyat di lokasi penelitian sudah layak secara ekonomi dan bagaimana kepekaan usahatani kakao rakyat apabila terjadi perubahan dalam

usahatani kakao, misalnya kalau terjadi perubahan biaya produksi, harga jual kakao, dan jumlah produksi kakao. Analisis kelayakan ekonomi perlu dilakukan karena usahatani kakao tidak hanya memberikan keuntungan bagi petani, tetapi juga memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, karena komoditi kakao dari perkebunan rakyat juga diekspor walaupun mutunya masih relatif rendah, maka perlu juga diketahui apakah usahatani kakao yang selama ini dilakukan oleh petani rakyat sudah dapat bersaing, terutama di pasar internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah usahatani kakao di Kabupaten Lampung Timur layak secara ekonomi untuk dilaksanakan?
2. Bagaimana sensitivitas usahatani kakao di Kabupaten Lampung Timur apabila terjadi perubahan biaya produksi, harga jual kakao, dan jumlah produksi?
3. Bagaimana daya saing usahatani kakao di Kabupaten Lampung Timur?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kelayakan ekonomi usahatani kakao di Kabupaten Lampung Timur.
2. Menganalisis sensitivitas usahatani kakao di Kabupaten Lampung Timur terhadap perubahan biaya produksi, harga jual kakao, dan jumlah produksi.
3. Menganalisis daya saing usahatani kakao di Kabupaten Lampung Timur.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Informasi dan bahan pertimbangan bagi para petani kakao dalam melakukan investasi.
2. Informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan program untuk pengembangan komoditi kakao.
3. Referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.